

Dinamika Peradaban Maritim dan Agraris di Sulawesi Selatan: Sebuah Studi Sejarah

Nurfaisa¹, Muzayyana Mufarrida², Fuadul Umam³

Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Email: nurfaizaharas@gmail.com, muzayyana138@gmail.com, fuad@unusia.ac.id

Abstract

The historical study of the Indonesian archipelago cannot be separated from the interaction between two major pillars of civilization: agrarian and maritime cultures. This research aims to examine the socio-economic and cultural dynamics of communities living within these two landscapes, focusing on coastal and inland societies in South Sulawesi. The region was chosen based on historical evidence showing its significance as a key node in the interaction between agrarian and maritime worlds, particularly in the exchange of goods, culture, and power. This study employs a historical-qualitative approach using online-based library research. All data were collected through the exploration of internet-accessible written sources such as academic journals, digital archives, and scholarly books, without direct field observation. The findings reveal that local communities developed adaptive systems combining land-based agriculture (rice fields and dryland farming) with maritime livelihoods (fishing, sailing, and sea trade), and shaped fluid, hybrid cultural identities. These interactions contributed to the formation of distinctive trade networks, spiritual systems, and social structures. This study is expected to enrich local historical narratives and contribute to a deeper understanding of cultural patterns in the Indonesian archipelago.

Keywords: Coastal Community, Indonesian History, Maritime and Agrarian Civilization, South Sulawesi.

Pendahuluan

Kajian sejarah Nusantara menunjukkan bahwa dua poros peradaban utama, yakni maritim dan agraris, telah membentuk struktur sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sejak masa pra-kolonial. Keduanya tidak hadir secara terpisah, melainkan saling berkelindan dalam berbagai bentuk interaksi. Dalam beberapa wilayah, seperti Sulawesi Selatan, dinamika ini bahkan tampak sangat nyata karena kawasan tersebut menyimpan jejak historis sebagai simpul pertemuan antara aktivitas laut dan daratan¹.

Komunitas pesisir di Sulawesi Selatan, terutama suku Bugis dan Makassar telah lama dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan pelayar ulung yang membangun jaringan maritim lintas Nusantara. Mereka mendirikan pelabuhan-pelabuhan besar, membangun kapal Pinisi, dan aktif dalam perdagangan antar pulau maupun dengan luar negeri. Di sisi lain, komunitas pedalaman seperti yang berada di dataran tinggi Toraja atau wilayah agraris seperti Soppeng dan Enrekang, mengembangkan sistem pertanian menetap, perladangan, serta struktur sosial berbasis tanah dan warisan agraria².

Studi-studi sejarah yang menyoroti interaksi antara masyarakat pesisir dan pedalaman masih relatif terbatas. Sebagian besar kajian terdahulu lebih fokus pada

¹ Singgih Tri Sulistiyono, “Paradigma Maritim Dalam Membangun Indonesia: Belajar Dari Sejarah,” *Lembaran Sejarah* 12, no. 2 (2018): 81, <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33461>.

² Ahmadin Ahmadin, “Sejarah Agraria: Sebuah Pengantar,” no. October 2013 (2019).

pelayaran, perdagangan, dan migrasi masyarakat pesisir Bugis-Makassar (Sulistiyono, 2018), sementara peran komunitas pedalaman dalam membentuk jaringan peradaban masih kurang mendapat perhatian. Padahal, relasi tersebut memegang peran penting dalam membentuk peradaban lokal yang kompleks. Dalam konteks Sulawesi Selatan, pertukaran beras dari daerah pedalaman ke pesisir, dan sebaliknya pengiriman garam atau ikan dari pesisir ke dataran tinggi, telah berlangsung selama berabad-abad dan membentuk pola mobilitas yang tidak hanya ekonomi, tetapi juga kultural³. Penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan menyoroti dinamika sosial-ekonomi dan budaya antara komunitas agraris dan maritim sebagai satu kesatuan yang saling membentuk.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak ada dikotomi kaku antara “masyarakat laut” dan “masyarakat darat”. Sebaliknya, terjadi simbiosis dan saling pengaruh. Masyarakat agraris memerlukan akses laut untuk perdagangan, sedangkan masyarakat maritim membutuhkan hasil bumi dari pedalaman. Interaksi ini menghasilkan bentuk-bentuk kebudayaan yang cair, terbuka, dan adaptif termasuk dalam praktik keagamaan, politik lokal, hingga sistem kekerabatan⁴.

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: bagaimana dinamika interaksi sosial-ekonomi dan budaya antara komunitas pesisir dan pedalaman di Sulawesi Selatan membentuk pola peradaban lokal yang khas?

Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan historis kualitatif dengan metode studi pustaka. Seluruh data diperoleh dari sumber tertulis yang tersedia secara digital, seperti artikel jurnal ilmiah, arsip daring, dan buku-buku akademik. Penelitian yang kami lakukan tidak observasi ke lapangan secara langsung, namun mengandalkan studi literatur yang telah terpublikasi dan terverifikasi⁵.

Dengan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai studi kasus, penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana sistem sosial ekonomi dan budaya terbentuk melalui pertemuan antara dua lanskap yaitu laut dan darat. Fokus utamanya adalah pada dinamika adaptasi masyarakat, pertukaran sumber daya, dan pembentukan identitas budaya dalam masyarakat Bugis-Makassar serta komunitas agraris di wilayah pedalaman.

Studi ini diharapkan dapat menambah khazanah dalam pengembangan kajian sejarah lokal, serta menunjukkan bahwa keterhubungan antara maritim dan agraris bukan hanya dimensi ekonomi, melainkan juga bagian integral dari pembentukan kebudayaan Nusantara. Selain itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana masyarakat tradisional membentuk pola hidup lintas-ekologi yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, dengan metode yang berlandaskan studi sejarah serta etnohistoris. Pendekatan ini dipilih

³ Adil Akbar, “Berre’ Ri Sulawesi Maniang : Dari Produksi, Perdagangan, Pelayaran, Hingga Penyelundupan Beras (1946-1956),” *Pangadereng : Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2019): 146–61, <https://doi.org/10.36869/v5i1.6>; Syafaat Rahman Musyaqqat, “Jaringan Perdagangan Beras Dan Dinamika Pelabuhan Ekspor Di Sulawesi Selatan Pada 1930-An,” *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 4, no. 2 (2021): 113–40, <https://doi.org/10.33652/handep.v4i2.157>.

⁴ Andi Agus, “Gambaran Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Sulawesi Selatan,” *Techno: Jurnal Penelitian* 7, no. 01 (2018): 143, <https://doi.org/10.33387/tk.v7i01.592>; Jawad Mughofar KH Fitria Annisa, Gilang Agus Budiman, “Kerajaan-Kerajaan Dan Pelabuhan Besar Di Nusantara,” *Jurusan Sejarah Dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung* 1, no. 1 (2016): 1–23.

⁵ Ahmadin, “Sejarah Agraria: Sebuah Pengantar”; Sulistiyono, “Paradigma Maritim Dalam Membangun Indonesia: Belajar Dari Sejarah.”

guna memperoleh pemahaman menyeluruh dan kontekstual terkait dinamika sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat di kawasan pesisir dan pedalaman dalam perspektif historis. Studi historis digunakan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau berdasarkan sumber tertulis, sedangkan pendekatan etnohistoris membantu mengungkap narasi budaya dan makna simbolik dari relasi antar komunitas, terutama antara masyarakat agraris dan maritim.

Sumber data yang ada dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh dari studi pustaka (library research). Penelitian tidak dilakukan dengan observasi lapangan secara langsung, melainkan mengandalkan data sekunder yang tersedia dalam bentuk jurnal ilmiah, buku akademik, laporan etnografi, arsip digital, dan dokumen sejarah lainnya yang dapat diakses melalui internet. Penelusuran dilakukan dengan mengutamakan sumber yang telah terverifikasi secara akademik dan relevan dengan tema penelitian.

Penelitian ini memanfaatkan dua tipe sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber primer mencakup naskah-naskah sejarah, arsip kolonial yang telah didigitalisasi, laporan penelitian etnografis terdahulu, dan artikel jurnal hasil wawancara atau studi kasus yang mendalam. Sedangkan sumber sekunder mencakup buku-buku sejarah, artikel telaah (review), dan publikasi ilmiah lainnya yang membahas maritimisasi, agrarianisme, dan struktur sosial masyarakat Sulawesi Selatan.

Hasil pengumpulan data dianalisis melalui metode content analysis secara kualitatif. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama seperti sistem produksi pangan, jaringan perdagangan, peran pelabuhan, struktur tanah, serta bentuk-bentuk interaksi sosial antar komunitas. Analisis juga dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk menemukan pola, perubahan, dan kesinambungan dalam relasi agraris-maritim.

Meskipun tidak melakukan observasi langsung, penelitian ini tetap berupaya menjaga kedalaman analisis melalui pemilihan sumber yang akademis, representatif, dan tematik. Keterbatasan ini diimbangi dengan fokus pada pendalaman naratif sejarah dan pembacaan kritis terhadap dokumen, sehingga diharapkan hasil penelitian tetap relevan dan dapat memberikan kontribusi pada studi sejarah sosial-budaya di Indonesia, khususnya dalam konteks hubungan peradaban maritim dan agraris.

Hasil dan Pembahasan

1. Karakteristik Peradaban Maritim di Pesisir Sulawesi Selatan

Peradaban maritim di Sulawesi Selatan berkembang pesat karena dukungan geografis dan historis yang kuat. Letak strategis wilayah pesisir seperti Bone, Makassar, Pangkep, dan Luwu yang menghadap langsung ke Laut Flores dan Teluk Bone menjadikan kawasan ini sebagai jalur penting pelayaran dan perdagangan antarwilayah. Sejak masa pra-Islam hingga era kolonial, pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi Selatan telah memainkan peran sentral dalam membentuk jaringan maritim yang menghubungkan Nusantara bagian timur dengan barat⁶.

Salah satu ciri utama peradaban maritim di pesisir Sulawesi Selatan adalah mobilitas tinggi masyarakatnya. Suku Bugis dan Makassar dikenal sebagai pelaut ulung yang membangun jaringan dagang dari Selat Makassar hingga ke perairan Nusa Tenggara dan Maluku. Kapal tradisional seperti Pinisi menjadi simbol penting dalam konstruksi budaya maritim mereka. Kapal ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi dan perdagangan,

⁶ Sulistiyono, “Paradigma Maritim Dalam Membangun Indonesia: Belajar Dari Sejarah”; Fitria Annisa, Gilang Agus Budiman, “Kerajaan-Kerajaan Dan Pelabuhan Besar Di Nusantara.”

tetapi juga sebagai representasi status sosial dan teknologi lokal yang diwariskan lintas generasi⁷

Kehidupan sosial masyarakat pesisir didominasi oleh aktivitas kelautan seperti melaut, berdagang, dan membangun perkampungan nelayan di sekitar pelabuhan. Interaksi ekonomi yang tinggi menciptakan struktur sosial yang lebih terbuka dibandingkan masyarakat agraris pedalaman. Mobilitas memungkinkan terbentuknya komunitas kosmopolit yang bersifat multikultural, termasuk masuknya pengaruh Islam melalui jaringan pelayaran dan perniagaan⁸.

Sistem nilai dalam masyarakat pesisir juga sangat dipengaruhi oleh realitas maritim. Nilai keberanian, keterbukaan, kemandirian, dan solidaritas menjadi etos yang dominan. Hal ini tercermin dalam filosofi hidup masyarakat Bugis yang dikenal sebagai *siri'na pacce* (harga diri dan empati), yang juga diterapkan dalam konteks persaingan dagang dan pergaulan antarkelompok di kawasan pelabuhan⁹. Identitas maritim menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebanggaan kolektif masyarakat pesisir.

Kegiatan pelayaran dan perdagangan juga turut membentuk jaringan kekuasaan lokal. Beberapa kerajaan pesisir seperti Bone dan Gowa memanfaatkan posisi geografinya untuk mengembangkan ekonomi berbasis laut dan menjalin relasi diplomatik dengan kerajaan lain maupun bangsa Eropa. Struktur pemerintahan maritim berkembang secara paralel dengan pertumbuhan pelabuhan dan kontrol atas komoditas ekspor seperti beras, rempah, dan garam¹⁰.

Dalam aspek spiritualitas, masyarakat pesisir tidak memisahkan laut sebagai entitas fisik semata, melainkan juga memiliki nilai sakral. Ritual-ritual seperti *Maccera 'Tasi'* atau *Mappanretasi* dilakukan sebagai bentuk penyucian laut dan permohonan keselamatan. Kehadiran tokoh adat dan tokoh agama dalam ritual ini menunjukkan keterpaduan antara tradisi lokal dan Islam yang diinternalisasi dalam kehidupan spiritual masyarakat pesisir¹¹.

Selain itu, struktur permukiman di pesisir menunjukkan pola adaptasi terhadap lingkungan laut. Rumah-rumah panggung dibangun di atas air atau dekat pantai untuk memudahkan akses ke laut. Tata ruang kampung nelayan menyesuaikan dengan pasang-surut air laut dan musim angin. Adaptasi ekologis ini menjadi bagian dari kearifan lokal dalam menghadapi tantangan alam sekaligus memperkuat sistem kehidupan komunal berbasis laut¹².

⁷ Dini Purbani Safri Burhanuddin, A.M. Djuliati Suroyo, Endang Susilowati , Singgih Tri Sulistyono, Agus Supriyono, Sutejo Kuat Widodo, Ahmad Najid, "Sejarah Maritim Indonesia," *Sejarah Maritim Indonesia* 185 (2003): 185.

⁸ Akbar, "Berre' Ri Sulawesi Maniang : Dari Produksi, Perdagangan, Pelayaran, Hingga Penyalundupan Beras (1946-1956)"; Musyaqqat, "Jaringan Perdagangan Beras Dan Dinamika Pelabuhan Ekspor Di Sulawesi Selatan Pada 1930-An."

⁹ Safri Burhanuddin, A.M. Djuliati Suroyo, Endang Susilowati , Singgih Tri Sulistyono, Agus Supriyono, Sutejo Kuat Widodo, Ahmad Najid, "Sej. Marit. Indones."

¹⁰ Fitria Annisa, Gilang Agus Budiman, "Kerajaan-Kerajaan Dan Pelabuhan Besar Di Nusantara"; Musyaqqat, "Jaringan Perdagangan Beras Dan Dinamika Pelabuhan Ekspor Di Sulawesi Selatan Pada 1930-An."

¹¹ Ismail Suardi Wekke, "ISLAM DAN ADAT : TINJAUAN AKULTURASI BUDAYA DAN AGAMA Dalam Masyarakat Bugis," *Analisis* XIII, no. 1 (2013): 27–56, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v13i1.641>; Ibnu Azka, Fathur Baldan Haramain, and Mohammad Cholil Alwi, "Harmonization of Tradition and Islam: Mediating Culture and Religious Beliefs in Maccera Tasi Ritual in Luwu, South Sulawesi," *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 13, no. 1 (2024): 30–56, <https://doi.org/10.31291/hn.v13i1.736>.

¹² A B Takko, "Budaya Bugis Dan Persebarannya Dalam Perspektif Antropologi Budaya," *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya* 15, no. 1 (2020): 27–36, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jlb>.

Dalam konteks ekonomi modern, karakteristik maritim ini tetap terlihat dalam kegiatan nelayan kecil, industri perikanan, serta transportasi laut lokal. Meski teknologi telah berubah, pola mata pencaharian dan struktur sosial berbasis laut tetap bertahan, terutama di desa-desa pesisir yang belum terintegrasi sepenuhnya dalam sistem ekonomi darat. Dengan demikian, peradaban maritim tetap menjadi kekuatan budaya dan ekonomi masyarakat pesisir hingga kini¹³.

Namun, peradaban maritim di Sulawesi Selatan tidak hanya terbatas pada aktivitas ekonomi. Relasi antar kampung, sistem kekerabatan lintas pulau, hingga penyebaran bahasa Bugis-Makassar ke luar Sulawesi menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya laut dalam membentuk identitas regional. Tradisi merantau (*massompe*) misalnya, merupakan hasil dari worldview maritim yang melihat laut bukan sebagai batas, tetapi sebagai jalan penghubung¹⁴.

Dengan demikian, karakteristik peradaban maritim masyarakat pesisir Sulawesi Selatan dapat dilihat sebagai hasil dari interaksi antara faktor ekologis, teknologi lokal, jaringan perdagangan, dan sistem nilai budaya. Laut bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang budaya, spiritual, dan politik yang membentuk kompleksitas identitas maritim yang hidup dan dinamis hingga hari ini.

2. Dinamika Peradaban Agraris di Pedalaman Sulawesi Selatan

Berbeda dengan komunitas pesisir yang membangun peradaban di sekitar laut dan pelabuhan, masyarakat pedalaman Sulawesi Selatan mengembangkan sistem kehidupan yang berpusat pada daratan dan pertanian. Kawasan seperti Soppeng, Enrekang, Wajo bagian utara, dan terutama dataran tinggi Toraja, dikenal sebagai wilayah agraris yang menggantungkan hidup pada pertanian, peternakan, dan sistem ladang. Lahan-lahan subur di lereng gunung atau sepanjang aliran sungai digunakan untuk menanam padi, jagung, kopi, dan komoditas lokal lainnya¹⁵.

Sistem pertanian yang berkembang di pedalaman cenderung menetap dan berbasis pada ikatan keluarga atau klan. Setiap komunitas memiliki pengaturan pembagian tanah yang khas, termasuk pengelolaan sawah secara komunal, pembagian hasil panen, hingga tata kelola irigasi tradisional. Praktik-praktik ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan kultural karena diikat oleh nilai gotong royong, sistem pewarisan, dan relasi patron-klien lokal¹⁶.

Dalam masyarakat agraris pedalaman, struktur sosial cenderung hierarkis dan kaku, dengan peran elite adat (arung, puang) dalam mengatur kehidupan komunitas. Legitimasi sosial banyak bertumpu pada kepemilikan lahan dan garis keturunan. Sistem warisan tanah bersifat patrilineal, dan akses terhadap sumber daya pertanian sering kali memperkuat stratifikasi sosial. Hal ini berbeda dari masyarakat pesisir yang lebih cair dan terbuka akibat mobilitas dagang¹⁷.

Salah satu ciri khas peradaban agraris pedalaman adalah hubungan spiritual yang kuat dengan alam. Masyarakat Toraja misalnya, mempercayai bahwa tanah adalah warisan

¹³ Afdhal Faizur Ridho and Imam Fadhil Nugraha, “Praktik Massompek Sebagai Prinsip Penyebaran Dan Ketahanan Diaspora Bugis Di Wilayah Maritim Indonesia-Malaysia,” *Student Research Journal* 2, no. 6 (2024): 119–36, <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v2i6.1632>.

¹⁴ Selfia Agustina and Moch Iqbal, “Antropologi Suku Bugis,” *Dawuh* 5, no. 2 (2024): 71–86, <https://siducat.org/index.php/dawuh>.

¹⁵ Ahmadin, “Sejarah Agraria: Sebuah Pengantar.”

¹⁶ Nurdin, “Shifting Land Management Pattern and Sustainable Agriculture (Study Case of Tombolopao District, Gowa Regency, South Sulawesi),” *Unhas University*, 2018.

¹⁷ Fitria Annisa, Gilang Agus Budiman, “Kerajaan-Kerajaan Dan Pelabuhan Besar Di Nusantara”; Ahmadin, “Sejarah Agraria: Sebuah Pengantar.”

leluhur yang tidak boleh diperjualbelikan sembarangan. Tradisi-tradisi adat semacam *Rambu Solo'* dan *Rambu Tuka'* tidak semata-mata berkaitan dengan peristiwa kematian dan kehidupan, melainkan juga memiliki keterikatan yang kuat dengan siklus pertanian, khususnya pada masa tanam dan panen. Kehidupan agraris menjadi bagian dari struktur kosmologis masyarakat.

Kehadiran Islam di wilayah pedalaman Sulawesi Selatan memang tidak sekuat di pesisir. Namun, wilayah seperti Soppeng dan Wajo tetap mengalami proses Islamisasi yang menarik, karena terjadi pertemuan antara syariat dengan nilai adat yang agraris. Hal ini melahirkan bentuk religiositas yang khas, di mana praktik Islam dibingkai dalam kearifan lokal seperti zikir di sawah, syukuran panen, atau ritual tolak bala yang digabungkan dengan pembacaan doa-doa Islam¹⁸.

Relasi antara pedalaman dan pesisir dalam konteks agraria juga tampak dalam perdagangan beras. Daerah seperti Enrekang dan Wajo dikenal sebagai sentra produksi beras yang hasilnya dijual ke pelabuhan-pelabuhan di pesisir. Proses distribusi ini tidak hanya menciptakan jaringan ekonomi, tetapi juga mempertemukan nilai-nilai budaya dan praktik sosial dari dua komunitas yang berbeda secara geografis dan simbolik¹⁹.

Secara ekonomi, masyarakat agraris mengembangkan ketergantungan pada musim dan siklus alam. Kalender pertanian ditentukan oleh cuaca, curah hujan, dan kondisi tanah. Dalam banyak kasus, komunitas petani menciptakan sistem pengetahuan lokal yang disebut *pengetahuan ekologis tradisional*, seperti ramalan cuaca berbasis alam atau teknik bercocok tanam berdasarkan fase bulan²⁰. Pengetahuan ini diwariskan secara lisan dan menjadi bagian dari identitas komunitas.

Perubahan politik dan kebijakan agraria di masa kolonial dan pascakemerdekaan juga memengaruhi struktur sosial agraris. Penguasaan tanah oleh negara, reformasi agraria, hingga komersialisasi lahan telah mengubah pola hubungan antara manusia dan tanah. Beberapa konflik agraria muncul di wilayah pedalaman karena ketimpangan akses dan monopoli tanah oleh elite lokal atau investor luar²¹.

Meski demikian, banyak masyarakat pedalaman masih mempertahankan prinsip-prinsip agraris tradisional. Misalnya, pembagian hasil panen masih dilakukan berdasarkan sistem bagi hasil adat, bukan berdasarkan kontrak modern. Sistem gotong royong dalam membuka lahan dan panen pun masih bertahan, bahkan digunakan untuk mempererat relasi antar keluarga dan tetangga dalam satu komunitas²².

Dengan demikian, peradaban agraris di pedalaman Sulawesi Selatan memiliki karakteristik khas dengan berbasis darat, menetap, berstruktur sosial ketat, dan spiritualitas agraris yang kental. Ia tidak berdiri sendiri, melainkan terus berinteraksi dengan dunia maritim di pesisir. Studi ini menempatkan komunitas pedalaman sebagai aktor aktif dalam

¹⁸ Sarifa Suhra and Rosita Rosita, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ritual Maddoja Bine Pada Komunitas Masyarakat Bugis Di Sulawesi Selatan,” *Al-Qalam* 26, no. 2 (2020): 387, <https://doi.org/10.31969/alq.v26i2.883>.

¹⁹ Musyaqqat, “Jaringan Perdagangan Beras Dan Dinamika Pelabuhan Ekspor Di Sulawesi Selatan Pada 1930-An.”

²⁰ Efriani Efriani et al., “Ekologi Tradisional Dayak Tamambaloh,” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 18, no. 3 (2020): 503–14, <https://doi.org/10.14710/jil.18.3.503-514>.

²¹ Ahmaddin, “Sejarah Agraria: Sebuah Pengantar”; Ratnawati Tahir, “Adaptasi Petani Kecil Dan Perempuan Terhadap Keterpinggiran Karena Modernisasi Pertanian: Studi Perubahan Sosial Pada Komunitas Petani Padi Sawah Desa Sereang Dan Desa Passeno Di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan,” 2008, 311.

²² NURHIKMA, “Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Mappalili Di Dusun Katteong Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang,” 2016, 1–23.

pembentukan sejarah dan budaya Nusantara, bukan sekadar pelengkap dari narasi pesisir yang dominan.

3. Interaksi Sosial-Ekonomi antara Komunitas Pesisir dan Pedalaman

Hubungan antara komunitas pesisir dan pedalaman di Sulawesi Selatan telah terbentuk sejak masa pra-kolonial dan berlanjut secara dinamis hingga kini. Kedua komunitas ini menjalin relasi timbal balik yang saling menguntungkan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Interaksi ini tidak hanya didorong oleh kebutuhan akan komoditas masing-masing, tetapi juga oleh faktor geografis, jaringan perdagangan lokal, serta sistem nilai yang berkembang secara paralel²³.

Secara ekonomi, masyarakat pedalaman—khususnya petani dari wilayah seperti Soppeng, Enrekang, dan Toraja—memproduksi hasil pertanian seperti beras, kopi, dan hasil hutan non-kayu. Komoditas ini kemudian didistribusikan ke wilayah pesisir melalui jalur darat atau sungai. Sebaliknya, masyarakat pesisir menyediakan hasil laut seperti ikan asin, garam, dan peralatan perkapalan, serta menjadi perantara distribusi barang-barang impor dari luar daerah. Pertukaran ini berlangsung secara rutin dan terorganisir, membentuk pasar regional yang saling bergantung²⁴.

Kedekatan geografis dan jaringan pelabuhan lokal mendukung intensitas hubungan ini. Beberapa titik pertemuan penting seperti pelabuhan Palopo, Bajoe, dan Sengkang menjadi simpul koneksi antara pedalaman dan pesisir. Dari tempat inilah berbagai aktivitas niaga, komunikasi budaya, hingga penyebaran agama terjadi. Jalur dagang tersebut juga menjadi rute penyebaran informasi, ideologi, dan teknologi antarwilayah²⁵.

Dari sisi sosial, hubungan antara nelayan dan petani tidak selalu bersifat fungsional-ekonomi, tetapi juga membentuk jaringan kekerabatan melalui pernikahan, migrasi musiman, atau patronase adat. Banyak keluarga nelayan memiliki kerabat di daerah agraris dan sebaliknya. Dalam budaya Bugis-Makassar, sistem *pagganggawa* (klien) dan *matoa* (tuan) melintasi batas geografis dan memperkuat kohesi sosial antara kelompok profesi yang berbeda²⁶.

Interaksi ini juga mempengaruhi struktur budaya kedua komunitas. Misalnya, sistem kepercayaan masyarakat pedalaman seperti ritual panen atau upacara tanah, mengalami perubahan dan penyesuaian ketika berinteraksi dengan nilai-nilai Islam yang lebih cepat berkembang di wilayah pesisir. Sebaliknya, tradisi pesisir seperti *Maccera' Tasi'* turut menyerap nilai-nilai agraris seperti syukuran panen laut, yang memperlihatkan adanya proses dialektika budaya yang saling membentuk.

Dalam konteks kolonialisme dan ekonomi politik, interaksi ini turut diperkuat oleh sistem tanam paksa, pengumpulan pajak, dan infrastruktur transportasi yang menghubungkan daerah hinterland dengan pelabuhan utama. Pemerintah kolonial Belanda sangat bergantung pada pasokan beras dari pedalaman Sulawesi Selatan untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor, terutama ke Jawa dan luar negeri. Situasi ini memperdalam

²³ Sulistiyo, “Paradigma Maritim Dalam Membangun Indonesia: Belajar Dari Sejarah.”

²⁴ Akbar, “Berre’ Ri Sulawesi Maniang : Dari Produksi, Perdagangan, Pelayaran, Hingga Penyalundupan Beras (1946-1956)”;

Musyaqqat, “Jaringan Perdagangan Beras Dan Dinamika Pelabuhan Ekspor Di Sulawesi Selatan Pada 1930-An.”

²⁵ Fitria Annisa, Gilang Agus Budiman, “Kerajaan-Kerajaan Dan Pelabuhan Besar Di Nusantara.”

²⁶ Merlinda Idin and Emilia Gunu Aran, “Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 11 (2023): 40–50.

integrasi ekonomi antara wilayah pesisir dan pedalaman, meski dalam kerangka yang eksploratif²⁷.

Mobilitas antarwilayah juga meningkat karena aktivitas perdagangan. Komunitas pesisir seperti Bugis dan Makassar dikenal sebagai perantau aktif (*massompe*) yang tidak hanya menjelajah laut, tetapi juga membawa komoditas hasil pertanian dari pedalaman ke pasar yang lebih luas. Di sisi lain, beberapa komunitas agraris memanfaatkan jaringan laut untuk mengembangkan ekonomi rumah tangga berbasis kerajinan, rempah-rempah, dan hasil hutan²⁸.

Pada level kultural, pertukaran pengetahuan juga berlangsung antara komunitas. Teknik pengawetan ikan, metode penangkapan laut, cara menyimpan padi, hingga pembagian warisan tanah menjadi pengetahuan lintas wilayah yang tersebar melalui kontak sosial di pasar, pelabuhan, dan rumah ibadah. Pengetahuan ini menjadi bagian dari sistem budaya yang adaptif, terbuka, dan saling belajar satu sama lain²⁹.

Meski relasi ini bersifat mutualistik, namun ketimpangan akses infrastruktur dan modernisasi menyebabkan dominasi wilayah pesisir dalam sistem ekonomi regional. Pelabuhan dan akses ke pusat pemerintahan menjadikan komunitas pesisir lebih cepat berkembang dalam konteks kapitalisme modern. Akibatnya, wilayah pedalaman sering kali tertinggal dalam hal teknologi, pendidikan, dan distribusi sumber daya publik. Namun demikian, relasi keduanya tetap berjalan dalam berbagai bentuk adaptasi³⁰.

Dengan demikian, interaksi sosial-ekonomi antara komunitas pesisir dan pedalaman di Sulawesi Selatan menunjukkan pola keterkaitan historis yang kuat. Interaksi ini menciptakan jaringan ekonomi, mobilitas sosial, dan pertukaran budaya yang saling melengkapi. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam membaca narasi sejarah lokal, karena justru dari dialektika inilah terbentuk identitas kebudayaan Sulawesi Selatan yang kompleks dan saling terhubung.

4. Islamisasi, Mobilitas, dan Adaptasi Nilai Budaya

Proses Islamisasi di Sulawesi Selatan berlangsung dinamis sejak awal abad ke-17, ditandai dengan Islamnya Raja Gowa dan Raja Bone pada tahun 1605. Momentum ini menjadi awal dari transformasi besar dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat Bugis-Makassar, termasuk di wilayah pesisir dan pedalaman. Penyebaran Islam tidak terjadi secara revolusioner, melainkan melalui pendekatan kultural, ekonomi, dan politik yang terhubung langsung dengan mobilitas maritim dan pertukaran antarwilayah³¹.

Wilayah pesisir menjadi pintu utama masuknya Islam melalui jaringan pelayaran dan perdagangan. Ulama dari Gujarat, Aceh, dan Minangkabau berdakwah di pelabuhan-pelabuhan penting, membentuk komunitas Muslim yang kuat. Islam menyebar bersama aktivitas dagang, memanfaatkan pergaulan antar pedagang dan interaksi sosial di pasar atau

²⁷ Musyaqqat, “Jaringan Perdagangan Beras Dan Dinamika Pelabuhan Ekspor Di Sulawesi Selatan Pada 1930-An”; Safri Burhanuddin, A.M. Djuliati Suroyo, Endang Susilowati , Singgih Tri Sulistyono, Agus Supriyono, Sutejo Kuat Widodo, Ahmad Najid, “Sej. Marit. Indones.”

²⁸ Idin and Aran, “Triwikrama J. Ilmu Sos.”

²⁹ Pawennari Hijjang, Munsi Lampe, and Muhammad Basir, “Aneka Ragam Pengetahuan Lokal Dan Kreatifitas Petani Yang Mendukung Agroecopreneuer Ramah Lingkungan Di Sulawesi Selatan,” *Sosiohumaniora* 16, no. 2 (2014): 143, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5726>.

³⁰ Julian Widya Saputra et al., “The Mappalili Tradition as a Form of Maintaining Agricultural Culture in South Sulawesi (Cultural Geography Perspective),” *Sanhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 7, no. 1 (2023): 181–89, <https://doi.org/10.36526/sanhet.v7i2.2613>.

³¹ Ayzumardi Azra, “JARINGAN ULAMA Timur Tengah & Kepulauan Nusantara Abad XV & XVII AKAR PEMBARUAN ISLAM INDONESIA,” 2013.

pelabuhan. Dalam proses ini, tradisi lokal tidak serta-merta ditinggalkan, tetapi mengalami proses adaptasi dengan ajaran Islam³².

Di pedalaman, Islamisasi berlangsung lebih lambat karena kuatnya struktur adat dan sistem kepercayaan animistik. Namun, dengan adanya hubungan dagang dan kekerabatan dengan komunitas pesisir, ajaran Islam perlahan diterima. Islam masuk melalui perantara elite lokal yang memiliki akses dagang ke pelabuhan atau pernah berinteraksi dengan kerajaan pesisir. Dakwah dilakukan secara halus melalui pernikahan, relasi sosial, dan akomodasi terhadap adat lokal.

Salah satu bentuk adaptasi yang khas terlihat dalam praktik ritual. Di wilayah pesisir, tradisi seperti *Maccera' Tasi'* atau pesta laut diselaraskan dengan nilai-nilai Islam melalui pembacaan doa dan penghapusan unsur animistik. Di pedalaman, ritual pertanian dan upacara siklus hidup seperti kelahiran dan kematian juga mulai dibingkai dalam kerangka keislaman. Ini menunjukkan adanya proses hibridisasi nilai yang tidak mematikan tradisi, tetapi menyelaraskannya dengan syariat³³.

Mobilitas masyarakat turut mempercepat penyebaran Islam dan transformasi budaya. Komunitas Bugis dan Makassar dikenal sebagai *massompe*³⁴ yakni perantau yang menjelajah ke luar daerah bahkan luar negeri. Mobilitas ini menjadi sarana penting penyebaran agama, ideologi, dan nilai-nilai etika Islam. Perantau membawa pulang pengalaman religius yang kemudian diadopsi oleh komunitas asal mereka³⁵.

Adaptasi nilai budaya juga tampak dalam sistem hukum dan pemerintahan lokal. Konsep Islam tentang keadilan, zakat, dan hukum waris mulai menggantikan sistem adat tertentu, terutama di wilayah pesisir. Di pedalaman, sistem pemerintahan lokal tetap mempertahankan unsur adat namun mulai mengakomodasi peran ulama atau tokoh agama sebagai penasehat spiritual dan moral komunitas³⁶.

Pendidikan Islam juga menjadi instrumen penting dalam pembentukan peradaban baru. Pesantren dan surau di pesisir berkembang lebih awal dan menjadi pusat transmisi ilmu ke pedalaman. Anak-anak dari daerah agraris dikirim belajar ke kota pelabuhan, lalu kembali dengan membawa pengetahuan Islam. Hal ini tidak hanya mengubah religiositas pribadi, tetapi juga memperkaya wacana budaya lokal dengan narasi keagamaan baru³⁷.

Proses Islamisasi di Sulawesi Selatan tidak berlangsung seragam. Di beberapa wilayah, nilai-nilai adat tetap dominan dan bertahan dalam bentuk simbolik, sementara di wilayah lain terjadi pengislaman struktur sosial secara total. Namun demikian, proses ini tidak memicu benturan besar karena adanya kesadaran kolektif untuk menyeimbangkan adat dan agama. Prinsip *ade' na agama* menjadi falsafah hidup masyarakat Bugis-Makassar hingga hari ini³⁸.

Adaptasi budaya yang terjadi memperlihatkan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan memiliki kemampuan tinggi dalam mengelola perbedaan. Mereka tidak melihat Islam sebagai ancaman terhadap budaya, melainkan sebagai bagian dari proses pembaruan dan

³² Sulistiyo, "Paradigma Maritim Dalam Membangun Indonesia: Belajar Dari Sejarah."

³³ Idin and Aran, "Triwikrama J. Ilmu Sos."

³⁴ Afdhal Faizur Ridho and Imam Fadhil Nugraha, "Praktik Massompek Sebagai Prinsip Penyebaran Dan Ketahanan Diaspora Bugis Di Wilayah Maritim Indonesia-Malaysia."

³⁵ Idin and Aran, "Triwikrama J. Ilmu Sos."

³⁶ Ahmadin, "Sejarah Agraria: Sebuah Pengantar."

³⁷ Irwan Irwan et al., "Pola Pewarisan Pengetahuan Tradisional Pada Generasi Milenial (Suatu Alternatif)," *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 7, no. 2 (2024): 970–76, <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i2.9836>.

³⁸ Azka, Fathur Baldan Haramain, and Mohammad Cholil Alwi, "Harmonization of Tradition and Islam: Mediating Culture and Religious Beliefs in Maccera Tasi Ritual in Luwu, South Sulawesi."

penguatan identitas. Nilai-nilai Islam diterima bukan karena paksaan, tetapi karena relevansinya dengan etika sosial dan semangat kolektivitas masyarakat lokal.

Dengan demikian, Islamisasi di Sulawesi Selatan bukanlah proses tunggal, melainkan bagian dari dinamika interaksi sosial yang kompleks antara pesisir dan pedalaman. Mobilitas, perdagangan, dan relasi kekuasaan menjadi saluran utama penyebaran Islam. Adaptasi nilai budaya membentuk wajah Islam lokal yang berakar kuat pada tradisi, namun terbuka terhadap pembaruan spiritual dan etika universal.

Simpulan

Studi ini menegaskan bahwa memahami peradaban Sulawesi Selatan tidak cukup jika hanya melihatnya melalui pembagian maritim dan agraris secara terpisah, melainkan sebagai dua lanskap yang saling terhubung secara historis, ekonomi, sosial, dan budaya. Komunitas pesisir membentuk peradaban berbasis laut dengan mobilitas tinggi, jaringan perdagangan luas, serta struktur sosial yang terbuka. Sebaliknya, komunitas pedalaman mengembangkan sistem agraris yang menetap, berhierarki, dan memiliki keterikatan spiritual dengan tanah.

Interaksi antara kedua komunitas telah menciptakan jaringan sosial-ekonomi yang kompleks. Pertukaran hasil laut dan hasil bumi, relasi patron-klien lintas wilayah, serta keterhubungan pelabuhan dengan daerah hinterland menjadikan kawasan ini sebagai simpul penting integrasi peradaban. Proses Islamisasi turut memperkuat relasi tersebut melalui perantaraan pedagang, perantau, dan tokoh lokal, menghasilkan bentuk-bentuk adaptasi nilai yang khas dan kontekstual. Identitas maritim-agraris terbentuk secara dinamis melalui dialog antarbudaya.

Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya membangun narasi sejarah lokal yang tidak terfragmentasi, tetapi melihat komunitas pesisir dan pedalaman sebagai satu ekosistem sosial yang saling mendukung. Hal ini juga relevan untuk memperkaya perspektif pendidikan sejarah di sekolah maupun kebijakan kebudayaan daerah yang selama ini cenderung lebih fokus pada wilayah pesisir atau kota pelabuhan.

Keterbatasan studi ini terletak pada absennya observasi lapangan secara langsung, sehingga sebagian besar analisis bergantung pada sumber sekunder dan dokumen daring. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diharapkan dapat mengkombinasikan kajian arsip dengan metode etnografi atau wawancara, guna menggali lebih dalam pengalaman kolektif dan memori budaya masyarakat lintas ekologi.

Daftar Sumber

- Afdhal Faizur Ridho, and Imam Fadhil Nugraha. “Praktik Massompek Sebagai Prinsip Penyebaran Dan Ketahanan Diaspora Bugis Di Wilayah Maritim Indonesia-Malaysia.” *Student Research Journal* 2, no. 6 (2024): 119–36. <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v2i6.1632>.
- Agus, Andi. “Gambaran Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Sulawesi Selatan.” *Techno: Jurnal Penelitian* 7, no. 01 (2018): 143. <https://doi.org/10.33387/tk.v7i01.592>.
- Agustina, Selfia, and Moch Iqbal. “Antropologi Suku Bugis.” *Dawuh* 5, no. 2 (2024): 71–86. <https://siducat.org/index.php/dawuh>.
- Ahmadin, Ahmadin. “Sejarah Agraria: Sebuah Pengantar,” no. October 2013 (2019).
- Akbar, Adil. “Berre’ Ri Sulawesi Maniang : Dari Produksi, Perdagangan, Pelayaran, Hingga Penyelundupan Beras (1946-1956).” *Pangadereng : Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2019): 146–61. <https://doi.org/10.36869/v5i1.6>.
- Azka, Ibnu, Fathur Baldan Haramain, and Mohammad Cholil Alwi. “Harmonization of

- Tradition and Islam: Mediating Culture and Religious Beliefs in Maccera Tasi Ritual in Luwu, South Sulawesi.” *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 13, no. 1 (2024): 30–56. <https://doi.org/10.31291/hn.v13i1.736>.
- Azra, Ayzumardi. “JARINGAN ULAMA Timur Tengah & Kepulauan Nusantara Abad XV & XVII AKAR PEMBARUAN ISLAM INDONESIA,” 2013.
- Efriani, Efriani, Jagad Aditya Dewantara, Dewi Utami, and Indah Listyaningrum. “Ekologi Tradisional Dayak Tamambaloh.” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 18, no. 3 (2020): 503–14. <https://doi.org/10.14710/jil.18.3.503-514>.
- Fitria Annisa, Gilang Agus Budiman, Jawad Mughofar KH. “Kerajaan-Kerajaan Dan Pelabuhan Besar Di Nusantara.” *Jurusan Sejarah Dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung* 1, no. 1 (2016): 1–23.
- Hijjang, Pawennari, Munsi Lampe, and Muhammad Basir. “Aneka Ragam Pengetahuan Lokal Dan Kreatifitas Petani Yang Mendukung Agroecopreneuer Ramah Lingkungan Di Sulawesi Selatan.” *Sosiohumaniora* 16, no. 2 (2014): 143. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5726>.
- Idin, Merlinda, and Emiliana Gunu Aran. “Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 11 (2023): 40–50.
- Irwan, Irwan, Riska Khaerunnisa, A. Rizal, and Burhan Burhan. “Pola Pewarisan Pengetahuan Tradisional Pada Generasi Milenial (Suatu Alternatif).” *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 7, no. 2 (2024): 970–76. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i2.9836>.
- Musyaqqat, Syafaat Rahman. “Jaringan Perdagangan Beras Dan Dinamika Pelabuhan Ekspor Di Sulawesi Selatan Pada 1930-An.” *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 4, no. 2 (2021): 113–40. <https://doi.org/10.33652/handep.v4i2.157>.
- Nurdin. “Shifting Land Management Pattern and Sustainable Agriculture (Study Case of Tombolopao District, Gowa Regency, South Sulawesi).” *Unhas University*, 2018.
- NURHIKMA. “Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Mappalili Di Dusun Katteong Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang,” 2016, 1–23.
- Safri Burhanuddin, A.M. Djuliati Suroyo, Endang Susilowati , Singgih Tri Sulistiyono, Agus Supriyono, Sutejo Kuat Widodo, Ahmad Najid, Dini Purbani. “Sejarah Maritim Indonesia.” *Sejarah Maritim Indonesia* 185 (2003): 185.
- Suhra, Sarifa, and Rosita Rosita. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ritual Maddoja Bine Pada Komunitas Masyarakat Bugis Di Sulawesi Selatan.” *Al-Qalam* 26, no. 2 (2020): 387. <https://doi.org/10.31969/alq.v26i2.883>.
- Sulistiyono, Singgih Tri. “Paradigma Maritim Dalam Membangun Indonesia: Belajar Dari Sejarah.” *Lembaran Sejarah* 12, no. 2 (2018): 81. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33461>.
- Tahir, Ratnawati. “Adaptasi Petani Kecil Dan Perempuan Terhadap Keterpinggiran Karena Modernisasi Pertanian: Studi Perubahan Sosial Pada Komunitas Petani Padi Sawah Desa Sereang Dan Desa Passeno Di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan,” 2008, 311.
- Takko, A B. “Budaya Bugis Dan Persebarannya Dalam Perspektif Antropologi Budaya.” *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya* 15, no. 1 (2020): 27–36. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jlb>.
- Wekke, Ismail Suardi. “ISLAM DAN ADAT : TINJAUAN AKULTURASI BUDAYA DAN AGAMA Dalam Masyarakat Bugis.” *Analisis* XIII, no. 1 (2013): 27–56. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v13i1.641>.
- Yulian Widya Saputra, Edwardus Iwantri Goma, Aisyah Trees Sandy, and Rahmadi. “The

Dinamika Peradaban Maritim dan Agraris dalam Sejarah Nusantara: Studi Kasus Komunitas Pesisir dan Pedalaman di Sulawesi Selatan | Nurfaisa, Muzayyana Mufarrida, Fuadul Umam.

Mappalili Tradition as a Form of Maintaining Agricultural Culture in South Sulawesi (Cultural Geography Perspective)." *Sanhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 7, no. 1 (2023): 181–89. <https://doi.org/10.36526/sanhet.v7i2.2613>.